

SOSIALISASI PERANAN MAUJANA NAGORI DALAM MEMBINA HARMONISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MULTIETNIK DI NAGORI PAMATANG SIMALUNGUN KECAMATAN SIANTAR

Corry¹⁾, Ulung Napitu¹⁾, Marhaeni K.D. Matondang²⁾, Rosmeri Saragih³⁾, Erwin Purba⁴⁾, Ade Mey Lisca Nasution⁴⁾, Desyar Tania Apelin Saragih⁵⁾

¹⁾Dosen Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Pascasarjana dan Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Simalungun

²⁾Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Simalungun

³⁾Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Simalungun

⁴⁾Mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

⁵⁾Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Simalungun

E-mail : purbacorry470@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity aims to describe the role of maujana nagori in fostering harmonization of multiethnic community life in Nagori Pamatang Simalungun, Siantar District. In addition to these objectives, this activity is intended to provide a deep understanding to the community so that they can create a harmonious life, even though the community living in Nagori Pamatang Simalungun is pluralist in terms of ethnicity, religion, race, and between groups.

In the implementation of this socialization activity, lecture and question and answer methods were used from the speakers to all community members who attended the socialization. To optimize the socialization activities, the resource persons first consulted with the Head of Nagori so that they could invite the community and set a time for socialization so that the activities could be carried out properly. The results of the socialization activities show that the public's understanding of the importance of the role of Maujana Nagori in realizing the integration and harmonization of pluralist ethnic life in Nagori Pamatang Simalungun, Siantar District is increasing. Besides that, they are also enthusiastic about participating in the socialization and are willing to carry out constructive activities to support development and harmony of life in the midst of a multi-ethnic society.

KEYWORDS: *role, maujana nagori, harmonization, multiethnic*

PENDAHULUAN

Kecamatan Siantar merupakan sebuah wilayah administratif yang dihuni oleh beragam etnik (suku bangsa) dengan keanekaragaman budaya

dan adat istiadatnya masing-masing. Penduduknya bersifat multietnik. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat:

- a. Suku bangsa mempunyai daerah asal yang berbeda-beda;
- b. Golongan keturunan asing tidak mempunyai wilayah asal dalam wilayah Indonesia, dan
- c. Masyarakat terasing, yaitu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penduduk yang hidup dalam tahap kebudayaan sederhana (Koentjaraningrat, 1993).

Pematang Simalungun awalnya merupakan bagian dari Nagori Rambung Merah yang kemudian dimekarkan menjadi sejumlah nagori lainnya. Dalam perkembangannya sampai sekarang, Nagori Pematang Simalungun semakin banyak dihuni oleh masyarakat beraneka ragam atau masyarakat multietnik. Mereka hidup berdampingan secara harmoni dalam bingkai kebersamaan di tengah keberagaman.

Masyarakat Nagori Pematang Simalungun sudah cukup dewasa menyikapi bentuk-bentuk perbedaan, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Meski ada dua etnik terbesar di nagori ini yakni, Toba dan Jawa, bukan berarti kedua etnik ini saja yang mendominasi kontestasi pemilihan Pangulu. Terbukti sudah ada dua orang Pangulu yang berasal dari etnik minoritas dan hal itu tidak pernah jadi masalah bagi mereka dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam perbedaan.

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Soerjono (2003), bahwa masyarakat di Indonesia pada dasarnya terdiri dari berbagai etnik yang telah hidup membaaur dalam masyarakat secara dinamis. Keragaman etnik yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kehidupan kemasyarakatan terlihat sangat dinamis. Sesama etnik di Indonesia dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang multietnik atau multikulturalisme (Ujan dkk, 2011). Kondisi demikian merupakan potensi yang dapat membawa Nagori Pematang Simalungun kian berkembang sehingga dapat memperoleh manfaat demikian besar dari kondisi riil masyarakat yang sangat beragam. Dalam perkembangannya dinamika sosial masyarakat tetap saja menyisakan masalah tertentu. Sebab pada kenyataannya ada saja dampak sosial yang senantiasa terasa pada kelompok etnik tertentu, meski

resonansinya tidak sampai menyeruak ke permukaan apalagi sampai menimbulkan gesekan atau konflik berarti antar warga yang berbeda etnik.

Dalam proses perkembangan dinamika sosial masyarakat, identitas etnik tertentu tetap saja tampak lebih menonjol ketimbang prestasi tertentu atau sumbangsuhnya bagi perkembangan wilayah tempat tinggal mereka. Meskipun sampai saat ini masyarakat setempat mengakui tidak pernah mengalami konflik yang melibatkan kelompok etnik atau agama. Mereka membaaur secara alamiah dalam proses interaksi sosialnya. Hal ini membuktikan peran penting lembaga tertentu yang dapat merepresentasikan perwakilan masyarakat tetap sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan merawat keberlanjutan harmonisasi dan integrasi antaretnik dari masyarakat multietnik yang ada di Nagori Pamatang Simalungun.

Peran Maujana Nagori selaku institusi Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat dibutuhkan, agar polarisasi antara etnik pendatang dan etnik asli atau mereka yang telah bermukim lebih awal disana tidak terjadi, selalu bisa berjalan harmonis dalam dinamika interaksi sosial kehidupan masyarakatnya yang multikultural. Sebagai instrumen dari kelembagaan sosial masyarakat, Maujana Nagori secara kontinu memerankan fungsinya dalam rangka membangun dan membina keteraturan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono (2003), yang mengungkapkan bahwa lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) yaitu artinya sistem pengawasan daripada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Merujuk pada uraian tersebut, peran Maujana Nagori amat strategis dalam melakukan tindakan preventif, melalui proses-proses sosialisasi, baik formal maupun informal, sehingga interaksi sosial masyarakat tidak sampai mengarah ke tindakan yang disosiatif atau konflik. Dalam hal ini Maujana

Nagori bisa memainkan perannya sebagai institusi atau lembaga kemasyarakatan yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat yang dinaunginya, sehingga tercipta kenyamanan serta kedamaian masyarakat meskipun penduduknya sangat multietnik.

METODE

Sebelum dilaksanakan sosialisasi tentang peranan Maujana Nagori dalam membina harmonisasi antar kelompok etnik pada masyarakat multietnik di Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar, para narasumber dan mahasiswa melaksanakan pertemuan dengan Lurah Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar untuk menjadwalkan kegiatan berdasarkan pertemuan dengan Kepala Nagori Pamatang Simalungun dan Narasumber untuk memperoleh kata sepakat tentang jadwal, metode, tempat, dan peserta kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi tentang peranan maujana nagori dalam membina harmonisasi antar kelompok etnik pada masyarakat multietnik di Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 Minggu Ke-3 dengan terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dengan Lurah Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya-jawab dan tatap muka dengan para peserta yang terdiri dari masyarakat Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar. Seluruh kegiatan sosialisasi di dokumentasikan melalui foto dan di publikasi dalam jurnal pengabdian masyarakat.

Para narasumber secara bergantian menyampaikan materi pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan tanya-jawab kepada masyarakat tentang materi yang disampaikan. Pemberian kesempatan tanya-jawab kepada masyarakat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti penting pembauran dan harmonisasi serta kerja sama untuk memperkuat integrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Masyarakat Yang Multietnik di Nagori Pamatang Simalungun

Banyaknya penduduk di luar etnik Simalungun yang secara bertahap ke Siantar Simalungun tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuka lahan perkebunan di daerah berhawa sejuk ini. Praktis sejak tahun 1912, berdatanganlah secara bergelombang penduduk dari berbagai etnik di luar Simalungun, seperti etnik China, Toba, Mandailing dan Jawa. Pada tahun 1920 telah ada etnik Toba sebanyak 21.832 jiwa dan etnik Mandailing sebanyak 4.699 jiwa di Siantar Simalungun. Mereka tersebar di daerah perkebunan dan persawahan di Siantar Simalungun. Dengan adanya program transmigrasi kolonial Belanda, didatangkanlah etnik Jawa ke Simalungun untuk bekerja di sentra-sentra perkebunan milik perusahaan-perusahaan asing dengan sistem kerja kontrak (Maknur, 1999).

Dampak kedatangan berbagai etnik ini, wilayah Simalungun kemudian menjadi sangat pluralis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sistem sosial yang dianut masyarakat desa di wilayah Siantar Simalungun. Interaksi sosial ini dengan mudah terlihat dari suasana kehidupan masyarakat yang masih kental dengan pola hidup tradisional, meski telah dipengaruhi struktur budaya luar. Tetapi setidaknya pola hidup bermasyarakat secara bergotong royong dalam hubungan silaturahmi kekeluargaan masih sangat kental terlihat.

Meski penduduk Nagori Pamatang Simalungun terdapat beragam etnis dan agama, namun mereka mampu hidup berdampingan satu dengan yang lain. Hal ini bisa terlihat secara nyata pada warga yang penyebaran jumlah penduduk dilihat dari kumpulan etnik dan agama tidak merata. Ada suatu wilayah yang didominasi etnik dan agama tertentu, sementara ada juga yang langsung bercampur dalam suatu komunitas. Meski menurut sejumlah informan tak pernah terjadi konflik antar etnik di wilayah mereka, namun tentunya di masa-masa awal tetap saja ada polarisasi akibat kehadiran etnik Jawa yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda, meski tidak tercatat secara dokumentatif. Paling tidak, terdapat perubahan struktur demografi yang didominasi oleh etnik pendatang dari Pulau Jawa. Bisa saja terjadi kesenjangan ekonomi antara pendatang dengan pribumi dengan pola

permukiman yang bersekat-sekat (eksklusif) namun tidak ada dokumen tertulis tentang hal tersebut.

Di samping itu, perbedaan adat-istiadat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing etnik tentu juga turut memengaruhi interaksi sosial masyarakat setempat, sehingga tetap membutuhkan sebuah kearifan dan kepekaan budaya tersendiri. Kepekaan dan kearifan seseorang akan menghasilkan hubungan sosial yang harmoni (integrasi sosial). Harmonisasi akan muncul manakala masing-masing etnik yang ada, dapat hidup dengan saling memahami perbedaan di antara mereka atau dengan cara mengkonstruksi nilai yang bisa dianut bersama.

Sebaliknya kehidupan masyarakat multietnik yang tidak dibarengi dengan kearifan budaya, cenderung memunculkan konflik sosial. Konflik antarkelompok etnik biasanya muncul karena adanya kesalahpahaman satu sama lain. Kesalahpahaman yang terjadi dalam hubungan antar kelompok etnik yang berbeda budaya antara lain disebabkan oleh faktor subyektif adanya stereotip, yakni kecenderungan menganggap budayanya sendiri sebagai suatu kemestian, tanpa perlu dipersoalkan dan bahkan menggunakannya sebagai standar untuk mengukur budaya orang lain.

Pendapat terhadap tipe dan ciri-ciri yang dilekatkan pada etnik tertentu terkadang menjadi faktor utama tumbuhnya prasangka pada kelompok etnik yang lain. Menurut Liliwari, hal ini merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subyektif, hanya karena ia berasal dari kelompok tersebut (Liliwari, 2005). Ketidak efektifan hubungan antar kelompok etnik, menurut Liliwari antara lain disebabkan oleh adanya stereotip atau prasangka (Liliwari, 2002). Selain berbagai permasalahan tersebut, kehidupan sosial masyarakat juga kerap diwarnai konflik meskipun tidak tampak vulgar dalam bentuk kekerasan fisik atau permusuhan antar kelompok.

Kondisi ini tentunya menjadi masalah yang sangat urgen dan mendasar harus dipahami oleh masing-masing kelompok etnik. Harmonisasi hubungan antar etnik akan sangat tergantung pada bagaimana sikap masing-masing kelompok etnik menerima perbedaan yang ada. Semakin tinggi kepercayaan untuk saling menghargai antar etnik, semakin tinggi pula upaya pencegahan terjadinya konflik antar etnik.

Realitas keseharian kelompok etnik yang terkait adat istiadat dan bahasa asal daerahnya sangat memungkinkan mereka untuk hidup berkelompok. Hal demikian dapat dilihat dari adanya daerah-daerah yang

berciri khas etnik mayoritas yang bermukim di daerah tersebut, seperti di Huta (dusun) VIII Nagori Pematang Simalungun yang didominasi oleh etnik Toba, sedangkan di Huta I dan IV lebih didominasi oleh etnik Jawa.

2. Harmonisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Yang Pluralis

Istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti di bidang sosiologi, yaitu usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat; diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut juga pola integrasi (Shaddy, 1996). Lebih lanjut John McHardy Sinclair dalam *Corpus Concordance Collocation* (1991). Oxford: Oxford University Press (puskkpa.lapan.go.id, 2020), ditemukan kata *harmonious* dan *harmonize* dengan penjelasan sebagai berikut:

A relationship, agreement etc. That is harmonious is friendly and peaceful. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other. When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile. If you harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society etc.

Jadi harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyetarakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal. Goesniadhie (2006) menjelaskan istilah harmoni yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, terdiri dari:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebih,
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem,
- c. Proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan,
- d. Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi merupakan upaya maupun sebagai proses, yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan

dan kejanggalan senada dengan para ahli sosiologi sebelumnya. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem. Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyetarakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal (Goesniadhie, 2006).

Dalam pengertian lebih lanjut, suatu masyarakat akan berada dalam ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan bila berhasil membangun harmonisasi. Kenyamanan interaksi sosial yakni terciptanya keselarasan sosial, manakala dalam hidup bersama manusia mengedepankan sifat seimbang. Empati sosial yakni kesadaran identitas sosial setiap individu dalam meningkatkan kapasitas empati yang sebenarnya. Menghindari perilaku agresif karena berperan sebagai faktor pemicu kekerasan dan sumber konflik.

Harmoni sosial merupakan suatu keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan bersama masyarakat, dua kata yang saling berkesinambungan dan memiliki arti kata yang tidak dapat dipisahkan, merupakan keadaan yang selalu didambakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka. Keharmonisan akan terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Dari kedua gabungan kata tersebut, dapatlah diperoleh kesimpulan yang menggambarkan cita-cita tinggi dari kehidupan bermasyarakat.

Harmoni sosial tidak akan pernah tercapai ketika tidak tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dari setiap anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki perbedaan. Dengan demikian unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut di atas, yakni: adanya hal-hal yang bertentangan; menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan adanya kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

3. Interaksi Sosial Masyarakat Multietnik

Dalam konteks antropologi, kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang memenuhi sejumlah unsur, antara lain:

- a. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan,
- b. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya,
- c. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri,
- d. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Barth, 1988).

Kelompok etnik bisa saja memiliki kesamaan dalam soal agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan bahasa dan lain-lain yang seluruhnya berpayung pada satu kelompok yang disebut etnik. Oleh karena itu, etnik merupakan himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa atau pun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya dengan ciri-ciri tersendiri.

Antropolog lainnya, R. Naroll (Koentjaraningrat, 1985) menyusun suatu daftar untuk menentukan batas-batas dari masyarakat, bagian suku bangsa (etnik) yang menjadi pokok dan lokasi nyata dari deskripsi etnografi, yakni bentuk kesatuan masyarakat yang terdiri dari:

- a. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh suatu desa atau lebih
- b. Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa
- c. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politik-administratif
- d. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri
- e. Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik
- f. Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi
- g. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami suatu pengalaman sejarah yang sama
- h. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan lain merata tinggi
- i. Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam.

Menurut pandangan Smith (1981), bahwa suatu kelompok etnik dapat dibedakan dengan empat karakteristik yaitu:

- a. Perasaan spesifik tentang asal usul kelompok;
- b. Pengetahuan tentang sejarah dan kepercayaan kelompok dalam hal eksistensinya;
- c. Satu atau lebih dimensi-dimensi budaya kolektif individu dan
- d. Adanya solidaritas kolektif yang unik.

Dari sejumlah pendapat para ahli tersebut, meski pengertian-pengertian, definisi atau batasan-batasan dari pemikiran mereka ada yang tampak berbeda, namun pada hakikatnya terdapat kesepakatan tentang ciri kelompok etnik yaitu: adanya bentuk perilaku yang berpola secara budaya, di mana individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam hubungan yang demikian dekat kepada kelompoknya. Bahkan mereka merasa menjadi bagian dari jaringan kelompok yang begitu dekat; individu saling menyatu sama lain oleh adanya kesadaran bersama yang berlaku; dan kesamaan tingkah laku budaya yang digunakan sebagai tanda dari rasa keterkaitan biologis.

Terdapat beberapa aspek penyebutan suatu kelompok etnik yakni: suatu kelompok sosial yang mempunyai kesamaan sejarah, tradisi, serta kebudayaan yang sekaligus menjadi identitas kelompoknya dalam suatu masyarakat luas. Oleh karenanya kelompok etnik wajar jika memiliki bahasa sendiri, adat-istiadat serta agama sendiri, berbeda dengan kelompok lainnya yang ada dalam suatu masyarakat. Kelompok etnik juga memiliki kebudayaan berbeda namun di antara para anggotanya merasa memiliki subkultur yang sama. Mereka juga memiliki domain tertentu, berupa kesamaan peranan dan bentuk simbol serta bentuk-bentuk kesenian lainnya.

4. Multietnik dalam Masyarakat Majemuk

Struktur masyarakat di Kabupaten Simalungun secara umum pada kenyataannya terdiri atas kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan etnik (suku bangsa), agama, adat istiadat, budaya serta perbedaan-perbedaan khas tertentu lainnya. Oleh karena itulah secara vertikal struktur masyarakat di Kabupaten Simalungun, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi umum di Indonesia, yang juga ditandai oleh banyaknya perbedaan-perbedaan antara lapisan masyarakat yang beranekaragam. Perbedaan-perbedaan agama, adat istiadat dan ciri khas kedaerahan yang sangat beraneka ragam inilah yang sering kali disebut sebagai masyarakat majemuk atau *plural societies*. Masyarakat majemuk

adalah masyarakat yang menganut sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Garna (1996), masyarakat majemuk paling tidak terkait dengan dua konsep, yaitu: pertama, keragaman etnik adalah suatu keadaan yang mampu memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang tergabung atau disatukan, rasa menyatu melalui dasar kesetiaan, pemilihan nilai bersama dan pembagian kekuasaan; dan kedua, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras dan etnik yang berbeda di bawah satu sistem pemerintahan dan paksaan. Sementara itu dalam mengkaji masyarakat majemuk, Usman Pelly mengusulkan pula dua konsep yang penting untuk diperhatikan; yakni konsep wadah pembauran (*melting pot*) dan konsep pluralisme kebudayaan.

Pada dasarnya kedua konsep ini mempunyai asumsi bahwa suatu waktu integrasi itu akan terjadi dengan sendirinya. Konsep ini juga mempunyai dasar pemikiran bahwa kelompok-kelompok etnik yang berbeda satu sama lain seyogyanya didorong untuk saling mengembangkan sistem budayanya sendiri dalam kebersamaan, agar dengan siapa orang lain itu, mengerti apa yang ia perbuat dan kenapa mereka berbuat demikian (Pelly, 1989).

Terkait dengan hubungan sosial antaretnik ini, Barth (1969) menyebutkan pandangannya, antara lain:

- a. Batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan antaretnik tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi. Namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan, sehingga perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik.
- b. Dapat diketemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama dan penting antara dua kelompok etnik yang berbeda yang biasanya terjadi karena adanya status yang terpecah dua (terdekotomi). Dengan kata lain ciri masing-masing kelompok etnik berbeda tersebut tidak

ditentukan oleh adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya justru karena disadari oleh terbentuknya sistem tertentu.

Para sosiolog juga mengemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat majemuk adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan sub kebudayaan antara satu dan lainnya.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer (tidak saling melengkapi).
- c. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar.
- d. Sering kali mengalami konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain, akan tetapi sering berintegrasi jika terdapat persamaan kepentingan, cara pandang, tujuan dan lain-lainnya, atau terjadinya integrasi melalui proses paksaan.
- e. Terjadi dominansi politik suatu kelompok atau oleh aliansi kelompok terhadap kelompok lain yang lemah.

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yakni hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok (misalnya etnik) yang satu dengan kelompok etnik lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Jika ditelisik lebih jauh, terjadinya hubungan antaretnik ini merupakan wujud interaksi sosial, karena adanya saling ketergantungan kebutuhan antara sesama manusia. Sebab pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu manusia hidup dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (1993), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang saling terikat oleh suatu identitas bersama. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya pertemuan langsung atau kontak sosial dan komunikasi antarindividu, meski satu sama lain terdapat banyak perbedaan yang dapat dilihat dari sudut pandang psikologis, sosiologis, antropologi maupun aspek-aspek lainnya.

Kontak sosial ini merupakan produk dari pertemuan antarpribadi yang akan membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan persamaan-persamaan yang dimiliki, misalnya persamaan bahasa, persamaan budaya, agama dan lain sebagainya. Individu-individu di suatu wilayah akan mencari

sendiri kelompok di mana mereka harus masuk dan bergabung yang menurutnya cocok dan sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian halnya dalam kelompok masyarakat multietnik atau multikulturalisme yang terdiri dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang ada di Nagori Pamatang Simalungun. Secara sosiologis, masyarakat multietnik atau multikulturalisme adalah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, yang berkenaan dengan suku, agama, ras, golongan, atau gender. Multietnik atau biasa diartikan multikulturalisme berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya.

Suatu kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat dapat berwujud beranekaragam dan memiliki ciri khas masing-masing dari suatu kelompok atau daerah. Keanekaragaman etnik merupakan suatu kekayaan kebudayaan yang menjadi modal dan pilar dalam membentuk masyarakat bahkan suatu negara yang kuat dan utuh. Sebaliknya keanekaragaman antaretnik yang tidak diiringi dengan sikap saling kerja sama dan saling menghargai antar etnik yang satu dengan etnik yang lain akan menjadi potensi konflik dan pada akhirnya akan menimbulkan disintegrasi di tengah masyarakat yang majemuk. Sebab masing-masing etnik memiliki strategi dalam hubungan sosial dengan etnik lainnya.

Oleh karena itulah, keanekaragaman budaya, etnik dan agama di Nagori Pamatang Simalungun sangat memungkinkan terjadi benturan budaya, konflik antar agama atau pertikaian antar kelompok dan individu. Meskipun pada kenyataannya, potensi tersebut tidak pernah terjadi, karena masyarakat di Nagori Pamatang Simalungun sampai saat ini senantiasa hidup dalam kedamaian, di mana hubungan sosial berjalan secara harmonis, interaksi antar individu dan kelompok etnik. Sebagaimana kondisi di Kabupaten Simalungun secara umum yang dikenal sebagai wilayah masyarakat majemuk suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama.

Oleh karena itu, pluralisme dan multikulturalisme dapat memberikan implikasi bahwa setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitasnya. Realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah keragaman yang lahir dari suku, budaya, bahasa dan agama yang terus dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan, golongan minoritas dan mayoritas, strata ekonomi dan sosial yang berbeda pandangan (*point of view*) sebagai masalah dan mengandung potensi konflik. Oleh karena itu, agar pluralisme dan multikulturalisme

dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat harus mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme baik dalam interaksi sosial antaretnik, agama, bahasa dan adat istiadat.

5. Proses Interaksi Sosial Masyarakat Multietnik

Interaksi yang terjadi antarkelompok yang berbeda latar belakang etnik dalam masyarakat majemuk sangat ditentukan oleh struktur sosial yang dimaknai sebagai tata aturan relasi yang berpola tertentu sebagaimana yang diharapkan masing-masing kelompok. Interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat dalam perspektif sosiologis disebut proses sosial. Proses sosial antar kelompok berbeda etnik dalam suatu masyarakat biasanya akan mengarah pada dua bentuk asosiatif dan disosiatif. Proses sosial dapat disebut asosiatif apabila mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Sebaliknya proses sosial disebut disosiatif, apabila dalam berinteraksi menunjukkan adanya gerak pemisahan dan konflik. Kedua kecenderungan dalam berinteraksi demikian akan membentuk suatu pola hubungan sosial dalam masyarakat yang sering disebut sebagai pola hubungan asosiatif dan disosiatif.

Interaksi sosial antar kelompok berbeda etnik yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat bisa saja mengarah pada pola disosiatif sebagaimana juga dapat mengarah pada pola asosiatif atau integrasi. Interaksi sosial antar manusia selalu berada dalam proses dinamis. Tanpa proses, interaksi sosial hanya terjadi dari satu pihak ke pihak lain dengan tanpa kesan apa-apa. Dalam konteks interaksi antar kelompok etnik pada suatu wilayah tertentu biasanya berlangsung proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Integrasi sosial hanya akan terwujud melalui beberapa tahapan.

Dengan demikian, interaksi sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan identitas dirinya kepada orang lain, dan menerima pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain. Untuk memahami interaksi sosial secara komprehensif, Liliweri menyarankan agar kita selalu memahami unsur-unsur serta proses interaksi sosial.

Unsur-unsur interaksi sosial tersebut meliputi; struktur sosial, tindakan sosial, relasi sosial dan *impression management*. Sedangkan proses

interaksi sosial meliputi pertukaran sosial, kerja sama, persaingan dan konflik. Liliweri mencatat, paling tidak terdapat tiga tahapan dalam proses interaksi yaitu; pertukaran sosial, kerja sama dan konflik. Sementara itu menurut Park, lingkaran relasi antar ras mengikuti tahapan-tahapan; kontak, persaingan, akomodasi dan asimilasi. Meski berbeda dalam memahami tahapan-tahapan proses interaksi, keduanya sepakat bahwa adaptasi merupakan proses yang harus dilalui dalam hubungan antar kelompok berbeda etnik yang hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kontak antar kelompok etnik, maka terjadilah proses pertukaran sosial. Dalam proses pertukaran sosial inilah terjadinya adaptasi antar kelompok etnik, yang pada perkembangan selanjutnya sangat dimungkinkan terjadinya akomodasi, asimilasi dan kerja sama atau justru sebaliknya malah memunculkan persaingan dan konflik.

Kontak sosial antar kelompok yang berbeda latar belakang etnik, di samping melahirkan proses adaptasi pada kenyataannya juga memunculkan proses akomodasi. Sebagai proses sosial, akomodasi didefinisikan sebagai pribadi atau kelompok bekerjasama dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan atau permusuhan-permusuhan. Jadi walaupun ada perbedaan dan permusuhan, hal tersebut dilupakan dalam rangka kerja bersama. Interaksi antar kelompok etnik yang terjadi dalam masyarakat majemuk yang berbeda etnik tidak selamanya menghadirkan kohesi sosial atau integrasi tetapi sering pula menimbulkan konflik horizontal.

Konflik adalah pertentangan antara dua kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Pengertian ini mencakup kasus konflik dan potensialitas konflik. Konflik muncul karena adanya perjuangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat atau bahkan antar negara. Seringkali karena persaingan dalam penguasaan akses atau pengontrolan terhadap sumber daya maupun kesempatan-kesempatan yang terbatas. Sedangkan integrasi dapat didefinisikan sebagai suatu pola dalam suatu masyarakat tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Sebagai suatu proses sosial, integrasi potensialitas di mana kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan-kedekatan hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Konsep integrasi paling tidak dipakai dalam tiga makna, yaitu;

- a. Integrasi berarti suatu tingkat di mana seorang individu merasa memiliki suatu kelompok sosial atau kolektivitas dengan menerima norma, nilai, kepercayaan kelompok sosial itu;
- b. Integrasi berarti suatu tingkat di mana aktivitas atau fungsi tertentu dari lembaga atau subsistem yang berbeda dalam suatu masyarakat berada dalam keadaan saling melengkapi, tidak saling kontradiktif;
- c. Integrasi adalah hadirnya suatu lembaga khusus yang mendorong dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan masing-masing sub sistem masyarakat.

Walaupun terjadi perbedaan antara satu pengertian dengan yang lainnya sebagaimana uraian di atas, integrasi sosial juga tercakup dalam dua hal sebagai berikut;

- a. Bahwa integrasi merupakan suatu tingkatan hubungan antar kelompok dalam masyarakat;
- b. Dalam hubungan itu hadir suatu kesadaran kolektif yang antara lain berbentuk rasa memiliki kelompok, saling menjaga keseimbangan dan kebersamaan.

Integrasi sosial dibagi ke dalam tiga bentuk, yakni:

- a. Integrasi normatif, yang merupakan tradisi baku masyarakat untuk membentuk kehidupan bersama bagi mereka yang mengikatkan diri dalam kebersamaan itu;
- b. Integrasi komunikatif, komunikasi dalam hal ini hanya dapat dibangun bagi mereka yang memiliki sifat saling tergantung dan mau diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama;
- c. Integrasi fungsional yang hanya akan terwujud bila anggota yang mengikatkan diri menyadari fungsi dan peran mereka dalam kebersamaan.

6. Peranan Maujana Nagori dalam Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Multietnik

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang merupakan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah

tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori. Dalam Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Simalungun disebut dengan istilah Maujana Nagori. Fungsinya sama dengan BPD, yakni mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah nagori. Tujuan pembentukan BPD sangat baik, yaitu mendemokratisasikan pemerintahan desa. Dengan demikian, tidak terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang (Maschab, 2013).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa anggota Maujana Nagori dipilih dari dan oleh penduduk nagori, sedangkan pimpinannya dipilih oleh anggota Maujana Nagori itu sendiri. Maujana Nagori bersama kepala nagori atau di Kabupaten Simalungun disebut dengan Pangulu menetapkan peraturan nagori; menetapkan anggaran pendapatan nagori; membentuk lembaga-lembaga nagori lainnya sesuai dengan kebutuhan; menetapkan badan usaha nagori; menetapkan pelaksanaan peraturan nagori yang ditetapkan dengan keputusan kepala nagori. Oleh karena itulah, keberadaan Maujana Nagori amat strategis sebagai mitra pemerintah nagori dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Selain itu Maujana Nagori juga bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Istilah Nagori sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebutan lain untuk istilah "Desa". Oleh karena itu, sama dengan pengertian Desa, Nagori adalah "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam pemerintahan nagori, yang menjadi Kepala Pemerintahan adalah Pangulu. Sekretaris dan Kepala Urusan disebut dengan *Tungkot Nagori*. Sedangkan untuk pimpinan wilayah bagian nagori di lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagori adalah *Gamot* dan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya disebut dengan *huta* (kampung). Nagori bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan nagori bukan merupakan

bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, nagori memiliki hak untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas.

Peran Maujana Nagori sebagai pengendali sosial (*social control*) dalam rangka mengendalikan berbagai tingkah laku anggota kelompok sosial, dalam hal ini interaksi antaretnik, agar tingkah laku para anggota tersebut senantiasa dalam batas-batas yang konformis. Hal ini selaras dengan pendapat sosiolog, Setiadi (2011), yang mengartikan bahwa pengendalian sosial sebagai proses, baik direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa setiap warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Meskipun ahli sosiologi lainnya, Robert M Lawang membatasi pengendalian sosial merupakan cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang berbuat menyimpang, namun apa yang dikemukakan oleh Joseph S Reucek yang melihat pengendalian sosial dari aspek edukatif sangat relevan dengan peran Maujana Nagori. Meskipun kelembagaannya secara formal diatur resmi melalui Peraturan Daerah sebagai turunan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, namun Maujana Nagori bukanlah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi hukum bagi pelanggar norma-norma sosial.

Oleh karena itulah tindakan pengendalian yang dilakukan Maujana Nagori sebenarnya lebih bersifat preventif. Dalam rangka itu pula, guna menjalankan perannya dalam membina harmoni sosial masyarakat, Maujana Nagori harus senantiasa menjalin komunikasi secara intens dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan serta pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Sebab para tokoh tersebut diyakini memiliki peranan yang kuat dalam mengendalikan kehidupan sosial, seperti menjadi panutan atau teladan bagi kelompok atau komunitasnya.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peranan amat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peranan mencakup tiga hal utama, yakni:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Macam peranan yang melekat pada seseorang, menurut Soerjono (2003) merupakan peranan penting bagi individu-individu dalam masyarakat yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tersebut harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, sebab pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Menurut Thoha (2013) ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu: peran antarpribadi, dalam peranan antarpribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya dapat berjalan lancar. Mintzberg (2013) dibagi atas tiga bagian yakni:

- a. Peranan sebagai tokoh, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

- b. Peranan sebagai pemimpin, dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi pokoknya di antaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara, di sini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi.

David Berry (2003) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Dengan demikian peranan sangat penting dalam setiap program yang akan direncanakan untuk dijalankan. Bila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Oleh karena itulah, menurut fungsinya peranan dapat menjadi elemen yang memberi arah pada proses sosialisasi; pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan; dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; serta menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Thoha (1989) pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Jadi pembinaan merupakan faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Mathis (2002) pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasinya sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi dan pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sementara, Ivancevich (2008) mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaruan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Oleh karena itulah, pembinaan merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok lain yang terencana dan dilaksanakan terus-menerus dalam rangka memantapkan sesuatu yang sudah dicapai sebelumnya, sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Maujana Nagori merupakan kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam kehidupan etnik Simalungun merupakan salah satu perangkat daerah di tingkat Nagori berfungsi dan berperan selain melaksanakan fungsi legislatif di tingkat desa juga sebagai perencana pembangunan.
2. Maujana nagori pada perkembangan berikutnya yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat yang pluralis di Nagori Pamatang Simalungun mempunyai peranan penting untuk menjalin dan membina harmonisasi, integrasi dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya maujana nagori terlebih dahulu melaksanakan musyawarah dan koordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat dan aparat di Nagori Pamatang Simalungun.
4. Maujana nagori menampung seluruh aspirasi dari lapisan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam suku, agama, ras, dan golongan sehingga meminimalisasi terjadinya disharmonisasi, disintegrasi dan intoleransi antar umat beragama dan suku bangsa yang berbeda di Nagori Pamatang Simalungun.

SARAN

1. Seluruh lapisan masyarakat yang menjadi anggota dari maujana nagori seharusnya dalam kehidupan sehari-hari mencari persamaan dalam perbedaan bukan mencari perbedaan dalam persamaan suku dan agama yang ada di Nagori Pamatang Simalungun.
2. Seharusnya seluruh lapisan masyarakat dalam menyikapi perbedaan suku dan agama pada saat perkawinan seharusnya memiliki

pandangan yang konstruktif karena apabila terjadi perkawinan silang suku dan agama akan mempercepat dan memperkuat harmonisasi serta integrasi dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, Durri, dkk. *Metode Penelitian*. 2019. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Barth, Fredrik, (editor). 1969. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget & London: George Allen & Unwin.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Budaya* (terjemahan: Nining I Soesilo). 1988. Jakarta: UI-Press.
- Berry, David. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik* (terj: Daniel Dhakidae). 2007. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Primaco Akademika.
- Giddens, Anthony, dkk. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. (terj: Ninik Rochani Sjams). 2004. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. 2006. Surabaya: Penerbit JP Books.
- Guibernau, Montserrat, John Rex. *Ethnicity The Reader: Nasionalism, Multiculturalism and Migration*. (2nd Edition). 2010. Cambridge: Polity Press.
- H, Blink. *Opkomst en Ontwikkeling van Sumatra als Economicsh-Geografisch Gebied*. 1926. Den Haag: Gravenhage Mouton & Co.
- Harskamp, Anton van (Ed). *Konflik-konflik Dalam Ilmu Sosial* (terj. Bern Hidayat). 2005. Yogyakarta: Kanisius.
- Johnson, Daole Paul: *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (terj: Robert M.Z Lawang). 1986. Jakarta: Gramedia.
- John, Ivancevich M, dkk. *Perilaku dan Manajemen Organisasi* (Jilid 1 dan 2) 2008. Jakarta: Erlangga.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia* (jilid V). 1975. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. 1985. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. 1993. Jakarta: UI Press.

- Liliweri, Alo. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. 2005. Yogyakarta: LKis.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*. 2012. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. 2013. Yogyakarta: PolGov.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (terj Tjetjep Rohendi). 1992. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari., Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. 2005. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pelly, Usman. *Interaksi Antarsuku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. 1989. Jakarta: Depdikbud.
- Peljer, Karl J. *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur (1863-1947)*. Jakarta: Sinar Harapan.1985.
- Purba, M.D. *Mengenal Sang Nauluh Damanik Sebagai Pejuang*. 1980. Medan: MD. Purba.
- Rakhmat, Ioanes. *Etika Sosial Lintas Budaya (Terjemahan Bernard T Adeney. Strange Virtues: Ethnics In A Multicultural World)*. 2000. Yogyakarta: Kanisius.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. 2013. Bandung: Alfabeta.
- Robert, Mathis; Jackson John. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.2002. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA 3.
- Setiadi, Elly M., Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, Maknur. dkk. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Penelitian)*, 1999. Pematangsiantar: Pematangsiantar.
- Shaddy, Hassan (Ed). *Ensiklopedia Indonesia*, 1996. Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve.
- Smith, Antony D. 1981. *The Ethnic Revival in the Modern World*. Cambridge: University Press.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. 1985. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2003. Jakarta: Grafindo Persada.

- Susan, Novri. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. 2009. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Spradley, James P. Metode Etnografi (Edisi II).2007. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syarbaini, Syahril., Rusdiyanta. Dasar-dasar Sosiologi. 2009. Yoyakarta. Graha Ilmu.
- Tideman, J. Simalungun: Tanah Batak Timur dalam Keterasingan dan Perkembangannya Menjadi Bagian dari Daerah Perkebunan Pantai Timur Sumatra (terjemahan Djoko Marihandoko dan Harto Juwono). 2009. Jakarta: Frans Purba.
- Tilaar, H.A.R. Mengindonesia: Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. 2007. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi. 1989. Jakarta: Rajawali.
- Thoha, Miftah. Kepemimpinan Dalam Manajemen. 2013. Jakarta: Rajawali Pers
- Ujan, Andre Ata, dkk. Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. 2011. Jakarta: Indeks.
- https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmonisasi_2015.pdf, diakses pada Senin, 24 Agustus 2020.
- <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses 7 Juli 2020
- Arsip Sekretariat Kantor Pangulu Nagori Pamatang Simalungun Tahun 2019
- Dokumen Badan Pusat Statistik. Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2019.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori.